



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL PENDUDUK
REPUBLIK AZERBAIJAN
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG TENAGA KERJA, KETENAGAKERJAAN, DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL**

Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Penduduk Republik Azerbaijan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"; menyatakan kehendaknya untuk membangun dan mengembangkan hubungan aktif antara kedua negara di bidang tenaga kerja, ketenagakerjaan dan perlindungan sosial; mengacu pada potensi bidang kerja sama yang ada antara Para Pihak; menegaskan kembali tekadnya untuk menyatukan upaya kedua negara guna mengembangkan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan dengan berbagi praktik terbaik Para Pihak; telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan kerja sama antara Para Pihak di bidang tenaga kerja, ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.



Pasal 2 Bidang Kerja Sama

Para Pihak wajib bekerja sama dalam bidang-bidang utama berikut dalam kompetensinya sesuai dengan undang-undang nasional Negara masing-masing:

- a. pengembangan kapasitas pada norma dan standar ketenagakerjaan;
- b. penguatan sistem jaminan sosial;
- c. pengembangan sistem pelatihan kejuruan;
- d. pengembangan keterampilan untuk lapangan kerja bagi kaum muda;
- e. peningkatan pasar tenaga kerja;
- f. perlindungan sosial pekerja migran.

Pasal 3 Bentuk Kerja Sama

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini melalui bentuk-bentuk kerja sama sebagai berikut:

- a. pengaturan kunjungan timbal balik yang saling menguntungkan;
- b. seminar, lokakarya, dialog, dan pelatihan;
- c. pertukaran pandangan, informasi dan materi;
- d. koordinasi dan kerja sama dalam isu-isu kepentingan bersama dalam forum internasional di mana Para Pihak berpartisipasi; dan
- e. bentuk kegiatan lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 4 Pendanaan

Pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini harus disediakan dari alokasi anggaran yang dialokasikan oleh Para Pihak untuk tahun yang bersangkutan dan dari sumber-sumber lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang relevan.



Pasal 5 **Kelompok Kerja Bersama**

1. Para Pihak wajib membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk membahas, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Pertemuan Kelompok Kerja Bersama akan diadakan pada tanggal dan tempat yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal 6 **Unit yang bertanggung jawab**

Unit-unit yang bertanggung jawab dari Para Pihak untuk koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. dari Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Penduduk Republik Azerbaijan - Departemen Hubungan Internasional;
- b. dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia - Biro Kerja Sama.

Pasal 7 **Amandemen**

Atas persetujuan bersama Para Pihak, amandemen terhadap Memorandum Saling Pengertian ini dapat dibuat dalam bentuk protokol terpisah, yang akan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan mulai berlaku sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 11.

Pasal 8 **Kode Etik**

Para Pihak harus memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati dan mematuhi hukum dan



peraturan negara tuan rumah dan menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 9
Kewajiban berdasarkan Perjanjian Internasional

Ketentuan-ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya dimana negara-negara Pihak menjadi pihak.

Pasal 10
Penyelesaian Sengketa

Setiap perbedaan pendapat mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui perundingan dan/atau konsultasi antara Para Pihak.

Pasal 11
Pemberlakuan, Durasi dan Pengakhiran

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik yang mengkonfirmasi penyelesaian prosedur internal masing-masing yang diperlukan untuk pemberlakuan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Memorandum Saling Pengertian ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lagi dengan persetujuan tertulis bersama Para Pihak.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri



Memorandum Saling Pengertian ini melalui saluran diplomatik selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.

4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek atau program yang sedang berjalan yang dibuat sebelum pengakhiran tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan lain.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk itu, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat secara bersamaan melalui konferensi video di Baku dan Jakarta pada 14 Desember 2022 dalam dua rangkap, masing-masing dalam Bahasa Azerbaijan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, semua naskah sama-sama otentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dalam Memorandum Saling Pengertian ini, naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

**Kementerian Tenaga Kerja dan
Perlindungan Sosial Penduduk
Republik Azerbaijan**

**Sahil Babayev
Minister**

**Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia**

**Ida Fauziah
Minister**



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION
OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
AND THE MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON COOPERATION IN THE FIELDS OF LABOUR, EMPLOYMENT AND
SOCIAL PROTECTION**

The Ministry of Labour and Social Protection of Population of the Republic of Azerbaijan and the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, thereafter singularly referred to as a "Party" and collectively referred to as "the Parties";

expressing their intention to establish and develop active relations between the two countries in the fields of labour, employment and social protection;

referring to the existing potential areas of cooperation between the Parties;

reaffirming their determination to unite their efforts for developing a mutually beneficial bilateral cooperation by sharing the best practices of the Parties;

have agreed on the following:

**Article 1
Objective**

The objective of this Memorandum of Understanding is to develop cooperation between the Parties in the fields of labour, employment and social protection.

**Article 2
Areas of Cooperation**

The Parties shall cooperate on the following main areas within their competences in accordance with the national legislation of their States:

- a. capacity building on labour norms and standards;
- b. strengthening of social security system;
- c. development of vocational training system;
- d. skills development for youth employment;
- e. improvement of labour market;
- f. social protection of migrant workers.



Article 3 Forms of Cooperation

The Parties agree to implement this Memorandum of Understanding through the following forms of cooperation:

- a. organization of mutual visits;
- b. seminars, workshops, dialogues and trainings;
- c. exchange of views, information and materials;
- d. coordination and cooperation on the issues of mutual interest in international forums in which the Parties participate;
- e. other forms of activities as mutually agreed upon in writing by the Parties.

Article 4 Funding

Financing of the activities within the framework of this Memorandum of Understanding shall be provided from the budgetary appropriations allocated by the Parties for the relevant year and from other sources not prohibited by the relevant legislation.

Article 5 Joint Working Group

1. The Parties shall establish a Joint Working Group to discuss, monitor, and evaluate the implementation of this Memorandum of Understanding.
2. The meeting of the Joint Working Group shall be convened on the date and venue as mutually agreed by the Parties.

Article 6 Responsible Units

The responsible units of the Parties for coordination and oversight of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be:

- a. on behalf of the Ministry of Labour and Social Protection of Population of the Republic of Azerbaijan - the International Relations Department;
- b. on behalf of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia - the Cooperation Bureau.



Article 7 Amendments

Upon mutual consent of the Parties, amendments can be made to this Memorandum of Understanding in the form of separate protocols, which shall be an integral part of this Memorandum of Understanding and enter into force in accordance with the procedure set forth in Article 11.

Article 8 Code of Conduct

The Parties shall ensure that their personnel involved in the implementation of this Memorandum of Understanding will respect and comply with the laws and regulations of the host country and avoid any activity inconsistent with this Memorandum of Understanding.

Article 9 Obligations under International Treaties

Provisions of this Memorandum of Understanding do not affect the rights and obligations arising from other international treaties to which the states of the Parties are parties.

Article 10 Settlement of Differences

Any differences concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiations and/or consultation between the Parties.

Article 11 Entry into Force, Duration and Termination

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by the Parties through diplomatic channels confirming the completion of its respective internal procedures required for the entry into force of this Memorandum of Understanding.

2. This Memorandum of Understanding is concluded for a period of 3 (three) years and maybe extended for another period of 3 (three) years by mutual written consent of the Parties.



3. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification of its intention to terminate this Memorandum of Understanding through diplomatic channel at least 60 (sixty) days prior to its intended date of termination.

4. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the completion of ongoing project or programs made before such termination, unless the Parties decided otherwise.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Memorandum of Understanding.

Done concurrently through video conference at Baku and Jakarta on 14 December 2022 in two original copies, each in Azerbaijani, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail. The texts signed by a Party shall be exchanged through official channels for signature by the other Party.

**on behalf of the Ministry of Labour
and Social Protection of Population
of the Republic of Azerbaijan**

**Sahil Babayev
Minister**

**on behalf of the Ministry of Manpower
of the Republic of Indonesia**

**Ida Fauziyah
Minister**



**Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə
İndoneziya Respublikasının İşçi Qüvvəsi Nazirliyi arasında əmək, məşğulluq və
sosial müdafiə sahələrində əməkdaşlıq haqqında**

Anlaşma Memorandumu

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə
İndoneziya Respublikasının İşçi Qüvvəsi Nazirliyi, bundan sonra ayrılıqda "Tərəf", birlikdə
isə "Tərəflər" adlandırılacaq;

iki ölkə arasında əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahələrində fəal əlaqələr
yaratmaq və inkişaf etdirmək niyyətlərini ifadə edərək,

Tərəflər arasında mövcud potensial əməkdaşlıq sahələrinə əsaslanaraq,

Tərəflərin ən qabaqcıl təcrübələrini paylaşmaqla, qarşılıqlı faydalı ikitərəfli
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün öz səylərini birləşdirmək qərarını təsdiqləyərək,

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

**Maddə 1
Məqsəd**

Bu Anlaşma Memorandumunun məqsədi Tərəflər arasında əmək, məşğulluq və
sosial müdafiə sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir.

**Maddə 2
Əməkdaşlıq sahələri**

Tərəflər öz səlahiyyətləri çərçivəsində dövlətlərinin milli qanunvericiliyinə uyğun
olaraq aşağıdakı əsas istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq edirlər:

- a. əmək normaları və standartları üzrə potensialın gücləndirilməsi;
- b. sosial təminat sisteminin gücləndirilməsi;
- c. peşə hazırlığı sisteminin inkişafı;
- d. gənclərin məşğulluğu üçün bacarıqların inkişafı;
- e. əmək bazarının təkmilləşdirilməsi;
- f. əməkçi miqrantların sosial müdafiəsi.



Maddə 3 Əməkdaşlıq formaları

Tərəflər bu Anlaşma Memorandumunun aşağıdakı əməkdaşlıq formaları vasitəsilə həyata keçirilməsi barədə razılığa gəlirlər:

- a. qarşılıqlı səfərlərin təşkili;
- b. seminar, iclas, dialoq və təlimlər;
- c. fikir, məlumat və sənədlərin mübadiləsi;
- d. Tərəflərin iştirak etdiyi beynəlxalq forumlarda qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlər üzrə əlaqələndirmə və əməkdaşlıq;
- e. Tərəflərin qarşılıqlı yazılı razılığına uyğun digər fəaliyyət formaları.

Maddə 4 Maliyyələşdirilmə

Bu Anlaşma Memorandumu çərçivəsində fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsi Tərəflərin müvafiq il üçün ayrılmış büdcə təxsisatlarından və müvafiq qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən həyata keçirilir.

Maddə 5 Birgə İşçi Qrupu

1. Tərəflər bu Anlaşma Memorandumunun həyata keçirilməsinin müzakirəsi, monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün Birgə İşçi Qrupu yaradırlar.

2. Birgə İşçi Qrupun iclası Tərəflər arasında qarşılıqlı razılıq əsasında müəyyən olunan tarixdə və yerdə keçirilir.

Maddə 6 Cavabdeh qurumlar

Bu Anlaşma Memorandumunun həyata keçirilməsinin əlaqələndirilməsi və nəzarəti üzrə Tərəflərin cavabdeh qurumları aşağıdakılardır:

- a. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən - Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi;
- b. İndoneziya Respublikasının İşçi Qüvvəsi Nazirliyi tərəfindən – Əməkdaşlıq bürosu.



Maddə 7 Dəyişikliklər

Bu Anlaşma Memorandumuna Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan və 11-ci maddə ilə müəyyən olunan qaydada qüvvəyə minən ayrıca protokollar formasında rəsmiləşdirilən dəyişikliklər edilə bilər.

Maddə 8 Davranış qaydaları

Tərəflər bu Anlaşma Memorandumunun həyata keçirilməsində iştirak edən əməkdaşlarının ev sahibi ölkənin qanun və qaydalarına hörmətlə yanaşması və riayət etməsini və bu Anlaşma Memorandumuna hər hansı zidd fəaliyyətdən çəkinməsini təmin edir.

Maddə 9 Beynəlxalq müqavilələr üzrə öhdəlik

Bu Anlaşma Memorandumunun müddəaları Tərəflərin dövlətlərinin tərəf olduqları digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərə təsir etmir.

Maddə 10 Fikir ayrılıqlarının həll edilməsi

Bu Anlaşma Memorandumunun təfsiri və/və ya tətbiqi ilə bağlı hər hansı fikir ayrılığı Tərəflər arasında danışıqlar və/və ya məsləhətləşmələr yolu ilə dostcasına həll edilir.

Maddə 11 Qüvvəyə minmə, müddət və xitam olunma

1. Bu Anlaşma Memorandumu onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan müvafiq dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Tərəflərin diplomatik kanallar vasitəsilə göndərdikləri sonuncu yazılı bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.

2. Bu Anlaşma Memorandumu 3 (üç) il müddətinə bağlanılır və Tərəflərin qarşılıqlı yazılı razılığı əsasında növbəti 3 (üç) il müddətinə uzadıla bilər.

3. Hər bir Tərəf bu Anlaşma Memorandumunun müddətinin bitməsinə azı 60 (altmış) gün qalmış onu ləğv etmək niyyəti barədə yazılı şəkildə diplomatik kanallar vasitəsilə bildiriş verməklə bu Anlaşma Memorandumunu istənilən vaxt ləğv edə bilər.



4. Bu Anlaşma Memorandumunun ləğv edilməsi, Tərəflər başqa qərar vermədikləri təqdirdə davam edən layihənin və ya əvvəlcədən hazırlanmış proqramlarının yekunlaşdırılmasına təsir etmir.

Qeyd olunanların təsdiqi kimi müvafiq qaydada səlahiyyətəndirilmiş aşağıda imza edənlər bu Anlaşma Memorandumunu imzaladılar.

Bakı və Cakarta şəhərlərində videokonfrans vasitəsilə 14 dekabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan, İndoneziya və ingilis dillərində olmaqla iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. Bu Anlaşma Memorandumunun təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilində olan mətnə üstünlük verilir. Bir Tərəfin imzaladığı mətnlər digər Tərəfin imzalanması üçün rəsmi kanallar vasitəsilə mübadilə edilir.

**Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhəlinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi**
adından


Sahil Babayev
Nazir

**İndoneziya Respublikasının İşçi
Qüvvəsi Nazirliyi adından**

İda Fauziya
Nazir